



DPRD Pastikan Kawal Visi-Misi Sutarmidji

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengeluhkan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Provinsi Kalbar 2019, tidak sesuai dengan visimisinya sebagai Gubernur terpilih. Diusung enam partai dan didukung satu partai dengan 25 kursi dari total 65 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, apakah visi-misi seperti pendidikan gratis akan mudah digolkan?

Sekretaris Partai Golkar Kalbar, salah satu pengu-sung Sutarmidji, Prabasa Anantatur menjelaskan, pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, rencananya DPRD akan melakukan pengetukan palu perubahan anggaran. Hanya saja, Sutarmidji meminta pe-

ngetukan ditunda.

Prabasa mengatakan, penundaan itu berkaitan pula dengan defisit dan lainnya. Akhirnya, DPRD sepakat menunda ketuk palu. Menurutnnya, penundaan itu membuat Sutarmidji melihat realitas yang ada sekarang.

Awalnya, dia mengaku sudah meminta Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk membentuk tim sinkronisasi, agar visi dan misi masuk dalam anggaran 2019 maupun 2018. Namun ketika pelantikan dipercepat, hal itu sudah beda hal.

"Kita kan belum masuk dalam perubahan, berarti sudah wewenang Gubernur dilantik untuk itu. Di-undurnya sesuai keinginan Pak Sutarmidji, supaya beliau memahami apa saja sih

APBD tahun 2019," jelasnya, Senin (17/9).

Menurutnya, setelah Sutarmidji menilai dan mengkaji APBD yang sudah tersusun ditemukan bebe-

rapa item yang bisa dipangkas, seperti perjalanan dinas. Dengan memangkas biaya perjalanan dinas, barulah visi misi Gubernur bisa dia-komodir.

• Baca Halaman 7



Suyanto Tanjung
Ketua Hanura Kalbar

Jika sudah bicara kepentingan masyarakat, semua anggota DPRD Kalbar harus melepaskan dirinya dari partai mana.



Prabasa Anantatur
Sekretaris Golkar Kalbar

Ini baru internal eksekutif dulu. Komitmen kita sebagai pengu-sung eksekutif tentu akan mengawal terkait visi dan misi.





Hal 1 | dprd pastikan

Dia menjelaskan, dengan adanya permohonan pengunduran tersebut, bisa saja ada perubahan dari rencana yang sudah disusun sebelumnya.

“Sekarang kan APBD itu belum sampai tingkat DPRD. Kita kemarin baru bicara pembahasan KUA. Yang perubahan saja belum. Itu bisa saja dilakukan perubahan oleh Gubernur baru,” jelasnya.

Dia mengatakan, Laporan Panitia Anggaran untuk Perubahan belum sampai, apalagi kalau berbicara murni tentang anggaran 2019. Nanti setelah ada jadwal dari eksekutif, pembahasan tersebut baru ke DPRD.

“Ini baru internal eksekutif dulu. Komitmen kita sebagai pengusung eksekutif, tentu akan mengawal terkait visi dan misi,” tuturnya.

Menurutnya, masih ada waktu untuk visi dan misi Gubernur Sutarmidji diakomodir, dalam rapat kerja dan masuk dalam pembahasan. Dia meyakini seluruh anggota DPRD akan mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

“Saya yakin lancar saja nanti, apalagi memang di dalam aturan Mendagri APBD 2019, sesuai dengan visi dan misi Gubernur terpilih,” jelasnya.

Ketua Partai Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung mengatakan bahwa, partai yang dirinya pimpin akan tetap mendukung dan mengawal realisasi visi dan misi gubernur dan wakil gubernur baru Kalbar. Apalagi Hanura memang mengusung Sutarmidji-Ria Norsan.

“Tentu bagi partai-partai pendukung wajib mendukung sepenuhnya. Inikan untuk kepentingan masyarakat Kalbar, kita pasti mendukung,” tuturnya.

Khususnya dalam hal program pendidikan gratis, fraksi Hanura dan partai pendukung yang lain akan menyetujui di dalam pembahasan anggaran.

Dirinya mengatakan, efisiensi anggaran dibutuhkan Kalbar. Supaya dengan yang minim bisa dipergunakan

sebenar-benarnya untuk kepentingan Kalbar.

“Pelayanan publik yang baik yang salah satunya mengenai pendidikan gratis SMA/SMK yang dijanjikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baru,” jelasnya.

Sutarmidji menargetkan di tahun 2019, program sekolah gratis sudah harus terealisasi.

Menurut Tanjung, masih sangat sempit dan banyak waktu untuk pembahasan program tersebut. Terkait yang dikeluhkan selama ini dengan penggunaan anggaran yang kurang efektif, akan diperbaiki ke depan.

“Kita bersyukur punya Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro rakyat. Yang memang sepenuhnya memikirkan kepentingan masyarakat kita,” jelasnya.

Dirinya juga mengingatkan, yang paling ditunggu oleh masyarakat timur Kalbar adalah, pembangunan Kantor Gubernur dan DPRD Kapuas Raya, selain itu infrastruktur dan sebagainya.

Dia menegaskan, jika sudah bicara kepentingan masyarakat, semua anggota DPRD Kalbar harus melepaskan dirinya dari partai mana. Karena hal ini berbicara untuk masyarakat Kalimantan Barat, bukan berbicara untuk partai dan kelompok serta daerah mana.

“Kita berharap semua pihak bisa memahami kepentingan rakyat. Artinya, kita betul-betul membahas uang rakyat. Nah, APBD inikan uang milik rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya, untuk kepentingan rakyat,” jelasnya.

Tanjung meyakini bahwa seluruh anggota DPRD akan berbicara untuk rakyat, karena selama ini semuanya tidak ada berbicara untuk partai. Kalau sudah semuanya untuk kebutuhan rakyat, pasti semua menyatu untuk kepentingan rakyat.

Harus Diakomodir

Ketua DPD Nasdem Kalbar, Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan, seharusnya visi misi gubernur terpilih masuk dalam rencana kerja tersebut. Paling tidak, tahun 2019 sejumlah program sudah bisa diterapkan. Salah satunya program



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2018	Hal.: 7																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

pendidikan gratis.

“Bagi kami, mendukung apa yang dilakukan Gubernur, karena dia sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia, dan itu harus didukung semua pihak,” sebutnya.

Dia pun menerangkan, seharusnya dalam penyusunan anggaran hal itu diselenggarakan. Bila tak masuk seperti sekarang, bukan salah gubernur. Namun ada waktu untuk menyesuaikan dengan visi misi Sutarmidji.

“Solusinya harus masuk dalam rencana anggaran 2019, jadi harus menyesuaikan,” tutupnya.

Dalam unggahannya kemarin, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengaku kaget setelah melihat Rencana Kerja Anggaran Provinsi Kalbar 2019, hampir tak mengakomodir visi-misinya bersama Wakil Gubernur Ria Norsan.

Gubernur yang baru dilantik awal September ini mengungkapkan, salah satu programnya yakni, pendidikan gratis untuk SMA/SMK malah tak dianggarkan. Padahal sudah sejak awal dia minta semua disesuaikan dengan visi-misinya membangun Kalbar.

“Tapi yang paling kaget lagi, biaya perjalanan dinas totalnya setahun Rp220-an miliar. Belum sampai di situ, dan yang tak kalah kagetnya, ternyata mobil dinas ada 1.216 buah,” tulisnya di *fanpage* Facebook Bang Midji, Sabtu (15/9), pukul 23.44 WIB.

Dalam unggahannya, dia juga mengatakan, akhirnya dia memutuskan untuk memangkas separuh biaya perjalanan dinas dan mobil dinas, untuk dialokasikan ke pendidikan gratis.

“Alhamdulillah selesai satu janji. Inshaallah saya akan sampaikan kejutan-kejutan lain, biar masyarakat Kalbar tahu duit APBD untuk apa aja,” katanya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengaku mengapresiasi program pendidikan gratis SMA/SMK yang ditetapkan Sutarmidji. Berdasarkan hitungan pihaknya, diperlukan dana berkisar Rp100-200 miliar untuk mewujudkan hal itu.

Langkah Sutarmidji yang memotong pos perjalanan dinas dan mobil dinas pun dia dukung. Termasuk jika ingin melelang mobil dinas itu.

“Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk efisiensi biaya tentu akan didukung oleh DPRD Provinsi, karena tentu akan dialokasikan dana tersebut ke hal-hal yang lebih prioritas, untuk kesejahteraan dan pembangunan di Kalbar,” katanya.

Politisi Gerindra ini menuturkan, masih banyak pos pembiayaan yang bisa diefisienkan. Misalnya honor panitia pelaksana kegiatan yang dilakukan PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Peralannya, apa yang dilakukan di jam kerja, sudah dibayar digaji pokok, tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja lainnya.

“Saya rasa kalau diteliti lebih lanjut, masih akan ada biaya yang bisa kita efisiensi. Kami dalam rapat badan anggaran dan rapat komisi-komisi di DPRD Provinsi akan membantu Gubernur untuk mensinyalir lebih teliti lagi,” sebutnya.

Namun, legislator dari partai yang tidak mengukung Sutarmidji ini menjelaskan, untuk perjalanan dinas DPRD Provinsi, semua sudah diatur undang-undang dan tata tertib DPRD. Misalnya ketika membahas rancangan peraturan daerah, diperlukan konsultasi ke instansi lain atau studi banding ke DPRD provinsi lain. Untuk pos itu, menurutnya tidak bisa dilakukan efisiensi.

“Terhadap hal-hal itu tentu tidak bisa dilakukan efisiensi karena ada dasarnya. Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan efisiensi, tentu sesuatu yang tidak menyangkut langsung dari apa yang kami sampaikan tersebut,” katanya.

Dia meminta masyarakat tidak salah duga, karena apa yang dilakukan di DPRD adalah untuk kepentingan masyarakat. “Saya rasa kita sepakat mendukung Gubernur untuk efisiensi, baik biaya dan untuk percepatan pembangunan di Kalimantan Barat,” tutupnya. (iat/nak/bls)